



RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BENGKALIS**



KATA PENGANTAR

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan rangkaian penyempurnaan pembiayaan belanja guna mendukung pelaksanaan program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam memberikan pelayanan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada Tahun Anggaran 2024 dan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024.

Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai bidang urusan dan kewenangan sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini.



Bengkalis, 16 Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis,

SALMAN ALFARISI, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820519 201102 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024	8
BAB III RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
Bab IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Triwulan II Tahun Anggaran 2024	14
Tabel 3.1	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang keseluruhannya akan menuju pada satu tujuan yakni kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Secara hierarki penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD-P). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Alasan dasar disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada

Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya dan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada khususnya.

Perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dimaksud antara lain terkait pemenuhan alokasi gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari hasil rekonsiliasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis serta telah dilakukan pergeseran kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, pemenuhan kekurangan honorarium tenaga non Aparatur Sipil Negara, penyelesaian hutang pihak ketiga atas belanja kegiatan tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 yang telah disepakati alokasinya sesuai peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi kantor serta hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *readiness criteria* Dana Alokasi Khusus 2024 dan perencanaan untuk pembangunan tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan sarana dalam memecahkan masalah yang dihadapi untuk menjawab berbagai isu strategis dan tantangan pelaksanaan pelayanan sektor tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Bengkalis yang kemudian diverifikasi untuk memastikan indikator kinerja program kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis telah sepenuhnya tercantum pada Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dimaksud.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merujuk dan berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024;
19. Surat Undangan Nomor 000.7.2.4/BAPPEDA-PPEPD/355/2024 tanggal 18 April 2024, Hal Rapat Persiapan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
20. Surat Sekretariat Daerah Nomor 900.1.12/11/TAPD tanggal 2 Agustus 2024, Hal Penyusunan Pra Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sampai akhir tahun anggaran 2024 serta agar dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai berdasarkan target-target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2024.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis antara lain:

- a . Untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang telah dan akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024;
- b. Memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, khususnya yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah;
- c. Untuk mengukur kemampuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam mencapai target akhir tahun anggaran sesuai ketersediaan sumber daya dan potensi yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis disusun dengan sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 361 ayat 3 yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2024 serta sistematika penulisan, yang dijabarkan dalam:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Memuat ulasan (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2024 sampai dengan Triwulan II yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan uraian mengenai program kegiatan dan pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi Rencana Kerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ada di dalam rencana strategis perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pagu Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebesar Rp. 24.799.810.635,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang terbagi ke dalam Belanja Pegawai sebesar Rp. 12.541.262.709,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dan Belanja Operasional Kegiatan sebesar Rp. 12.258.547.926,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sebagai dukungan pelaksanaan 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Sampai bulan Juni tahun 2024 akun Belanja Pegawai telah direalisasikan sebesar Rp. 3.054.539.628,- (tiga milyar lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) atau setara dengan 24,36% (dua puluh empat koma tiga puluh enam persen) sedangkan akun Belanja Operasional Kegiatan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.415.657.507,- (tiga milyar empat ratus lima belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah) atau setara dengan 28,44% (dua puluh delapan koma empat puluh empat persen) digunakan untuk pelaksanaan 7 (tujuh)

program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.758.950.833,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 1.624.087.674,- (satu milyar enam ratus dua puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setara dengan 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima persen). Anggaran tersebut merupakan realisasi dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya penyusunan dokumen rencana perangkat daerah dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pengamanan barang milik daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor; Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan penyediaan jasa

pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan pagu anggaran Rp. 279.082.131,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 43.253.086,- (empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah) atau setara dengan 13,22% (tiga belas koma dua puluh dua persen) untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro;
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja pagu anggaran Rp. 1.576.952.462,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 176.356.100,- (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) atau setara dengan 20,38% (dua puluh koma tiga puluh delapan persen) yang digunakan untuk mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan sub kegiatannya proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, dan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten /kota; Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan sub kegiatannya pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; Kegiatan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan Kecil

dengan sub kegiatannya pelaksana konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

4. Program Penempatan Tenaga Kerja pagu anggaran Rp. 283.123.635,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 50.404.140,- (lima puluh juta empat ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) atau setara dengan 0,41% (nol koma empat puluh satu persen) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online* dan *job fair*/pasar kerja dan Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
5. Program Hubungan Industrial dengan pagu anggaran Rp. 5.125.212.709,- (lima milyar seratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 1.451.348.622,- (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau setara dengan 58,82% (lima puluh delapan koma delapan puluh dua persen). Anggaran tersebut digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatannya pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan, sub kegiatan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan dan sub kegiatan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; Kegiatan Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan

pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingannya di 1(satu) daerah kab./kota, penyelesaian perselisihan hubungan industri, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi perusahaan, pederasi dan konfederasi serikat kerja/serikat buruh serta non afiliasi, sub kegiatan pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota dan sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi pagu anggaran sebesar Rp. 101.500.583,- (seratus satu juta lima ratus ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 43.216.159,- (empat puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) atau setara dengan 42,58% (empat puluh dua koma lima puluh delapan persen) untuk melaksanakan Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi dengan sub kegiatan penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi pagu anggaran sebesar Rp. 133.725.573,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 26.991.006,- (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam rupiah) atau setara dengan 20,18% (dua puluh koma delapan belas persen).

Dari ke tujuh program tersebut, program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi merupakan program-program unggulan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi

kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai upaya stimulus ekonomi bagi pekerja sektor informal seperti buruh petani, peternak, nelayan dan lain-lain, peningkatan lapangan pekerjaan dan penerapan teknologi serta inovasi bidang perekonomian sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari faktor pendorong maupun faktor penghambatnya, antara lain:

1. Faktor-faktor pendorong terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun bersangkutan sehingga target kinerja dapat tercapai, serta adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai bentuk penyeimbangan pelaksanaan program dan kegiatan serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia. Terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta kerja sama seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis;
2. Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program kegiatan antara lain terkendala proses administrasi pengadaan barang jasa karena produk atau unit tidak tersedia dalam e-katalog, penyesuaian jadwal instruktur atau asesor pada sub kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, dan lain sebagainya.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 sampai dengan triwulan II dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2024

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 9

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 7+13		15 = 14/6 x 100%		(16)
	01.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	61.897.647.340,00	24560	9.830.999.109,00		17.482.069.189,00		2.071.372.086,00		2.607.255.216,00		0,00		0,00	-	4.678.627.302,00	24.560,00	14.509.626.411,00	100,00	23,44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	01.2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			867.960.000,00	-	151.672.600,00		-	0	31.237.010,00	0	52.470.755,00	0	0,00	0	0,00	-	83.707.765,00		235.380.365,00	-	27,12	
	01.2.01.0001.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	1	77.369.900,00	2 Dokumen	176.194.700,00	1 Dokumen	9.280.000,00	0 Dokumen	43.350.755,00	0	0,00	0	0,00	1,00	52.630.755,00		130.000.655,00	-	-	
	01.2.01.0006.		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	867.960.000,00	1	74.302.700,00	4 Laporan	50.654.000,00	2 Laporan	21.957.010,00	1 Laporan	9.120.000,00	0	0,00	0	0,00	3,00	31.077.010,00	4,00	105.379.710,00	22,22	12,14	
	01.2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.856.771.026,00	-	6.313.633.304,00		-	0	1.305.849.801,00	0	1.748.689,827,00	0	0,00	0	0,00	-	3.054.539.628,00		9.368.172.932,00	-	24,11	
	01.2.02.0001.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600%	38.856.771.026,00	12	6.313.633.304,00	50 Orang/bulan	12.744.404.562,00	0	1.305.849.801,00	0	1.748.689,827,00	0	0,00	0	0,00	-	3.054.539.628,00	12,00	9.368.172.932,00	2,00	24,11	
	01.2.03.		Administrasi Barang Milk Daerah pada Perangkat Daerah			3.933.600.000,00	-	633.600.000,00		-	0	168.000.000,00	0	112.000.000,00	0	0,00	0	0,00	-	280.000.000,00		913.600.000,00	-	23,23	

Print By eMONEY - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)											
		01.2.03.0002.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	214 Orang	3.933.600.000,00	-	633.600.000,00	1 Dokumen	633.600.000,00	0	168.000.000,00	0	112.000.000,00	0	0,00	0	0,00	-	280.000.000,00	-	913.600.000,00	-	23,23		
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.762.000,00	-	34.075.004,00			-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	34.075.004,00	-	48,84		
		01.2.05.0011.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	69.762.000,00	4	34.075.004,00	5 Orang	46.252.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	4,00	34.075.004,00	13,33	48,84		
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			8.247.078.400,00	-	1.411.855.451,00			-	0	277.855.098,00	0	372.271.658,00	0	0,00	0	0,00	-	650.126.756,00		2.061.982.207,00	-	25,00	
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	145 Jenis	179.400.000,00	6	33.259.700,00	2 Paket	30.765.800,00	0	6.041.996,00	0	9.449.974,00	0	0,00	0	0,00	-	15.491.970,00	6,00	48.751.670,00	4,14	27,17		
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Bulan	833.706.000,00	6	174.700.500,00	2 Paket	146.836.900,00	0	18.149.417,00	0	27.815.554,00	0	0,00	0	0,00	-	45.964.971,00	6,00	220.665.471,00	8,33	26,47		
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Bulan	1.280.920.000,00	18	221.740.000,00	2 Paket	302.520.000,00	0	9.050.000,00	0	57.950.000,00	0	0,00	0	0,00	-	67.000.000,00	18,00	288.740.000,00	25,00	22,54		
		01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	116 Jenis	799.362.800,00	10	77.672.900,00	2 Paket	121.719.000,00	0	7.700.491,00	0	19.086.337,00	0	0,00	0	0,00	-	26.786.828,00	10,00	104.459.728,00	8,62	13,07		
		01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Media	119.819.600,00	-	2.250.000,00	1 Dokumen	17.024.600,00	0	0,00	0	3.600.000,00	0	0,00	0	0,00	-	3.600.000,00	-	5.850.000,00	-	4,88		
		01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500 Laporan	3.340.670.000,00	156	636.032.351,00	400 Laporan	898.041.000,00	100 Laporan	163.713.194,00	100 Laporan	205.569.793,00	0	0,00	0	0,00	200,00	369.282.987,00	356,00	1.005.315.338,00	23,73	30,09		
		01.2.06.0011.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	146 Orang	1.693.200.000,00	-	266.200.000,00	1 Dokumen	300.600.000,00	0	73.200.000,00	0	48.800.000,00	0	0,00	0	0,00	-	122.000.000,00	-	388.200.000,00	-	22,93		
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			232.602.000,00	-	-			-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-		

Pilih ByeMONEY - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6 x 100%	(16)												
	01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	170 Unit	171.402.000,00	-	-	65 Unit	84.514.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	170 Jenis	61.200.000,00	-	-	30 Unit	71.036.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.403.091.634,00	-	468.479.452,00	-	0	122.883.103,00	0	102.016.249,00	0	0,00	0	0,00	-	224.899.352,00	-	693.378.804,00	-	20,37					
	01.2.08.0001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Orang; 15000 Lembar	1.220.563.200,00	455	206.667.600,00	800 Laporan	237.900.000,00	200 Laporan	58.488.000,00	200 Laporan	42.232.000,00	0	0,00	0	0,00	400,00	100.720.000,00	855,00	307.387.600,00	100,00	25,18				
	01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Bulan	2.067.328.434,00	12	238.394.972,00	12 Laporan	336.183.587,00	3 Laporan	56.251.423,00	3 Laporan	54.102.409,00	0	0,00	0	0,00	6,00	110.353.832,00	18,00	348.748.804,00	25,00	16,87				
	01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang	115.200.000,00	-	23.416.880,00	1 Laporan	27.631.040,00	0-	8.143.680,00	0-	5.681.840,00	0	0,00	0	0,00	-	13.825.520,00	-	37.242.400,00	-	32,33				
	01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	900.000.000,00	10	173.504.000,00	13 Unit	310.750.000,00	0	0,00	0-	79.492.227,00	0	0,00	0	0,00	-	79.492.227,00	10,00	252.996.227,00	27,78	28,11				
	01.2.09.0006.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	200.000.000,00	59	60.593.298,00	40 Unit	49.000.000,00	19 Unit	6.200.000,00	8 Unit	19.500.000,00	0	0,00	0	0,00	27,00	25.700.000,00	86,00	86.293.298,00	100,00	43,15				
	01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit; 300 Orang	3.986.812.280,00	10	583.586.000,00	6 Unit	577.072.000,00	0-	159.347.074,00	0-	120.814.500,00	0	0,00	0	0,00	-	280.161.574,00	10,00	863.747.574,00	16,67	21,67				
	01.2.09.0010.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	1.199.970.000,00	-	-	11 Unit	319.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-		

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung						
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	I		II		III				IV			13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 x 100%	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 x 100%		(16)			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										15.60	13.35	34.62	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	34.62	30.47			17.94	20.13					
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			90%	1.438.875.000,00	1	40.401.125,00		279.083.600,00			0,00		43.253.806,00			0,00			0,00		43.253.806,00	1,00	83.654.931,00	1,11	5,81	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja				1.438.875.000,00	-	40.401.125,00		-	0	0,00	0	43.253.806,00	0	0,00	0	0,00	-	43.253.806,00		83.654.931,00	-	5,81				
	02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	6 Dokumen	1.438.875.000,00	-	40.401.125,00	1 Dokumen	154.541.800,00	0	0,00	0	20.426.643,00	0	0,00	0	0,00	-	20.426.643,00	-	60.827.768,00	-	4,23					
	02.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		-	-	-	20 Orang	124.541.800,00	0	0,00	0	22.827.163,00	0	0,00	0	0,00	-	22.827.163,00		22.827.163,00	-	-					
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										0.00	0.00	18.34	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	15,77			16.38	2.11					
Predikat kinerja Program										Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			25%	7.276.645.102,00	214	1.387.342.357,00		1.512.662.900,00			74.903.700,00		101.452.400,00			0,00			0,00		176.356.100,00	214,00	1.563.698.457,00	100,00	21,49	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi				6.477.836.020,00	-	1.280.767.157,00		-	0	42.248.400,00	0	43.266.000,00	0	0,00	0	0,00	-	85.514.400,00		1.366.281.557,00	-	21,09				
	03.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1500 Orang	6.477.836.020,00	112	1.224.850.557,00	125 Orang	1.029.919.300,00	0	18.185.000,00	0	14.770.000,00	0	0,00	0	0,00	-	32.955.000,00	112,00	1.257.805.557,00	7,47	19,42					
	03.2.01.0002.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kespakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		-	1	21.166.700,00	4 Lembaga	106.548.900,00	0	15.447.900,00	2 Lembaga	28.496.000,00	0	0,00	0	0,00	2,00	43.943.900,00		65.110.600,00	-	-					

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
					6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 x 100%				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		(16)	
		03.2.01.0003.	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		-	34.749.900,00	25 Unit	171.918.700,00	0-	8,615,500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	8.615.500,00		43.365.400,00	-	-				
		03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			798.809.082,00	-	74.333.700,00		-	0	17.067.900,00	0	36.914.500,00	0	0.00	0	0.00	-	53.982.400,00		128.316.100,00	-	16,06			
		03.2.02.0001.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	102 LPK	798.809.082,00	8	74.333.700,00	10 Lembaga	105.885.300,00	3 Lembaga	17.067.900,00	4 Lembaga	36.914.500,00	0	0.00	0	0.00	7,00	53.982.400,00	15,00	128.316.100,00	14,71	16,06			
		03.2.04.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			-	-	32.241.500,00		-	0	15.587.400,00	0	21.271.900,00	0	0.00	0	0.00	-	36.859.300,00		69.100.800,00	-	-			
		03.2.04.0001.	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		-	-	32.241.500,00	5 Perusahaan	98.390.700,00	0-	15.587.400,00	0-	21.271.900,00	0	0.00	0	0.00	-	36.859.300,00		69.100.800,00	-	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11.40	10.65	32.40	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	27.58					14.25	7.10	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		85%	1.480.725.084,00	3066	158.305.483,00		283.126.100,00		25.885,469.00		24.518,671.00		0.00		0.00	-	50.404.140,00	3.066,00	208.709.623,00	100,00	14,10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		04.2.03.	Pengelolaan informasi pasar kerja			1.480.725.084,00	-	158.305.483,00		-	0	25.885,469.00	0	24.518,671.00	0	0.00	0	0.00	-	50.404.140,00		208.709.623,00	-	14,10			
		04.2.03.0002.	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pembeni Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6 Dokumen	780.833.384,00	2139	136.610.283,00	5000 Orang	98.712.700,00	134 Orang	25.885,469.00	179 Orang	24.518,671.00	0	0.00	0	0.00	313,00	50.404.140,00	2.452,00	187.014.423,00	100,00	23,95			
		04.2.03.0003.	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	240 Peserta	699.891.700,00	-	21.695.200,00	100 Orang	138.161.400,00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-	-	21.695.200,00	-	3,10			
		04.2.04.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		-	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-		-	-	-			
		04.2.04.0002.	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		-	-	-	25 Orang	46.252.000,00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-		-	-	-			

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung				
					6		7		8		9		10		11		12				13=9+10+11+12			14=7+13		15=14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		K	Rp	K	Rp
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9,09	8,74	13,51	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51	17,02			16,10	9,02			
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
	05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			95%	2.278.984.166,00	460	2.998.677.800,00		5.125.216.900,00		94.813.560,00		1.356.535,062,00		0,00		0,00		1.451.346.622,00	460,00	4.450.026.422,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
	05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.294.978.000,00	-	2.634.172.700,00		-	0	30.600.000,00	0	66.030.007,00	0	0,00	0	0,00		96.630.007,00		2.730.802.707,00	-	100,00			
	05.2.01.0001.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLPK Online	165 Dokumen; 72 Bulan		449.988.000,00	6	65.204.800,00	20 Perusahaan	78.960.200,00	5 Perusahaan	15.600.000,00	1 Perusahaan	10.400.000,00	0	0,00	0	0,00	6,00	26.000.000,00	12,00	91.204.800,00	7,27	20,27			
	05.2.01.0002.	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	220 Dokumen; 72 Bulan		409.990.000,00	10	57.340.300,00	5 Perusahaan	62.720.200,00	0	15.000.000,00	2 Perusahaan	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2,00	25.000.000,00	12,00	82.340.300,00	5,45	20,08			
	05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	6 Dokumen		435.000.000,00	-	2.511.627.600,00	1 Laporan	278.183.500,00	0	6.000,00	0	45.630.007,00	0	0,00	0	0,00	-	45.630.007,00	-	2.557.257.607,00	-	100,00			
	05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				984.006.166,00	-	364.505.100,00		-	0	64.213.560,00	0	1.290.505,055,00	0	0,00	0	0,00		1.354.718.615,00		1.719.223.715,00	-	100,00			

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung		
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	I		II		III			IV		13=9+10+11+12			14=7+13	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		05.2.02.00.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	-	24.000	4.148.075.000,00	0-	24.784,163,00	0-	1.203,921,600,00	0	0,00	0	0,00	-	1.228.705.763,00		1.228.705.763,00	-	-	
		05.2.02.0001.	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	8	83.427.400,00		25	139.667.700,00	0-	17,005,075,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-	17.005.075,00		100.432.475,00	-	-	
		05.2.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	195	676.064.696,00	21	128.347.400,00	25	139.667.700,00	2	22,424,322,00	0-	13,440,000,00	0	0,00	0	0,00	2,00	35.864.322,00	23,00	164.211.722,00	11,79	24,29	
		05.2.02.0003.	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	1	47.462.000,00		20	80.703.600,00	0	0,00	1	20,239,226,00	0	0,00	0	0,00	1,00	20.239.226,00		67.701.226,00	-	-	
		05.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	30	307.941.470,00	-	105.268.300,00	1	197.239.000,00	0	0,00	0-	52,904,229,00	0	0,00	0	0,00	-	52.904.229,00	-	158.172.529,00	-	51,36	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											11,83	9,06	26,72	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34	26,07			13,42	27,00	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	02.	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			100%	599.025.949,00	1	94.508.942,00		101.500.700,00		7,361,359,00		35,854,800,00		0,00		0,00	-	43.216.159,00	1,00	137.725.101,00	1,00	22,99	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RPKD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung					
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	I		II				III			IV		K	Rp	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6 x 100%		(16)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		02.2.01.	Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi			599.025.949,00	-	94.508.942,00			-	0	7.361.359,00	0	35.854.800,00	0	0,00	0	0,00	-	43.216.159,00		137.725.101,00	-	22,99	
		02.2.01.0004.	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	6 Dokumen	599.025.949,00	-	94.508.942,00	1 Dokumen	101.500.700,00	0-	7.361.359,00	0-	35.854.800,00	0	0,00	0	0,00	-	43.216.159,00	-	137.725.101,00	-	22,99		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											15,93	7,25	28,78	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	42,58			13,09	22,99		
Predikat kinerja Program											Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
		03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		100%	360.000.000,00	16	209.809.400,00		133.726.500,00		15.231.006,00		11.760.000,00		0,00		0,00	-	26.991.006,00	16,00	236.800.406,00	16,00	65,78	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		03.2.01.	Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			360.000.000,00	-	209.809.400,00		-	0	15.231.006,00	0	11.760.000,00	0	0,00	0	0,00	-	26.991.006,00		236.800.406,00	-	65,78		
		03.2.01.0006.	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	120 Orang	360.000.000,00	32	209.809.400,00	25 Orang	133.726.500,00	0-	15.231.006,00	0-	11.760.000,00	0	0,00	0	0,00	-	26.991.006,00	32,00	236.800.406,00	26,67	65,78		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											12,00	11,39	35,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	20,18			13,42	65,78		
Predikat kinerja Program											Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk			Sangat Buruk	Sedang		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											10,84	8,63	27,05	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27,48	25,66			8,48	30,73		
Predikat Kinerja OPD											Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk	Sangat Buruk			Sangat Buruk	Sangat Buruk		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPKD berikutnya*) :																										

Pilih By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024	Perangkat Daerah Penanggung
					K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14=7+13	15=14/6 x 100%	(16)					

*) Diisi oleh Kepala Bappeda



Disusun,
Bengkalis, - Juli - 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bengkulu

SALMAN ALFARISI, ST
Pembina
NIP. 19820519 201102 1 001

Dievaluasi,
Bengkalis, - Juli - 2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah



RINTO, SE. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19810601 200903 1 002

BAB III

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perkembangan keadaan dan situasi terhadap perubahan arah kebijakan penganggaran serta mempertimbangkan kondisi realisasi pendapatan Tahun 2024 berjalan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis diperlukan perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, yakni terkait pemenuhan alokasi gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari hasil rekonsiliasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis serta telah dilakukan pergeseran kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024, pemenuhan kekurangan honorarium tenaga non Aparatur Sipil Negara, penyelesaian hutang pihak ketiga atas belanja kegiatan tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan kebutuhan listrik, air dan komunikasi kantor serta hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan *readiness criteria* Dana Alokasi Khusus 2024 dan perencanaan untuk pembangunan tahun 2024 dengan tetap memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang menjadi program strategis Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Karenanya dalam rangka menyikapi hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis juga mengalami perubahan dalam akun belanja yang disampaikan dalam dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024.

Perubahan Anggaran Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terjadi pada 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah anggaran Rp. 176.193.838,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) perlu dilakukan penyesuaian pada akun belanja perjalanan dinas maka dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp. 18.008.880,- (delapan belas juta delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ke sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sehingga pada APBD-p sub kegiatan tersebut anggarannya diharapkan menjadi Rp. 194.202.718,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah); demikian halnya dengan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 50.653.010,- (lima puluh jut) perlu dilakukan penyesuaian pada akun belanja perjalanan dinas a enam ratus lima puluh tiga ribu sepuluh rupiah) maka dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp. 17.604.000,- (tujuh belas juta enam ratus empat rupiah) dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan ke sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sehingga diharapkan pada APBD-p sub kegiatan tersebut anggarannya diharapkan menjadi Rp. 68.257.010,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sepuluh rupiah);
- 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah, sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara alokasi anggaran sebesar Rp. 12.541.262.709,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh

satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah) telah dilakukan pergeseran sebesar Rp. 2.217.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah) ke Program Hubungan Industrial kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota sub kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja perkebunan sawit, kemudian dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 2.557.378.879,- (dua milyar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagaimana arahan dari TAPD Kabupaten Bengkalis sehingga pagu pada APBD-p menjadi Rp. 7.766.883.830,- (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);

- 1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD alokasi anggaran yang semula Rp. 691.200.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan honor tenaga pengamanan sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dikarenakan ada pengurangan 1 (satu) orang tenaga keamanan maka honorinya digeser ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga diharapkan pagu sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD pada APBD-p menjadi Rp. 672.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- 1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan anggarannya dirasionalisasi sebesar Rp. 43.930.000,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatannya antara lain:

1.5.1. Penyediaan bahan logistik kantor dilakukan penyesuaian anggaran pada akun belanja makan minum aktivitas lapangan yang digeser ke sub kegiatan pengadaan sarana prasarana sebesar Rp. 119.211.883,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar Rp. 19.808.117,- (sembilan belas juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sehingga diharapkan pada APBD-p anggaran pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor yang semula Rp. 302.520.000,- (tiga ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 163.500.000,- (seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

1.5.2. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 20.313.360,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah) yang digeser ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sehingga pada APBD-p sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang anggarannya semula Rp. 121.666.663,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) diharapkan menjadi Rp. 101.353.303,- (seratus satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga rupiah);

1.5.3. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –undangan dilakukan pengurangan anggaran atau rasionalisasi sebesar Rp. 3.974.600,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) sehingga yang semula anggarannya sebesar

Rp. 17.024.600,- (tujuh belas juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada APBD-p diharapkan menjadi Rp. 13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);

- 1.5.4. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi atau merasionalisasi anggaran sebesar Rp. 39.530.557,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ratus lima puluh tujuh rupiah) pada akun belanja alat tulis kantor, menggeser anggaran akun belanja makan minum rapat ke akun belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) serta penambahan anggaran sebesar Rp. 58.203.903,- (lima puluh delapan juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah) dari sub kegiatan lain pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga anggaran yang semula Rp. 844.206.618,- (delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus enam ribu enam ratus delapan belas rupiah) diharapkan akan menjadi Rp. 902.410.521,- (sembilan ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
- 1.5.5. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dilakukan penyesuaian anggaran dengan menggeser anggaran akun belanja pemeliharaan website sebesar Rp. 2.400.000,- untuk memenuhi anggaran gaji Tenaga Non ASN sebanyak 2 orang kali 3 bulan dikarenakan kenaikan status pendidikannya pada sub kegiatan yang sama dan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sehingga yang semula anggaran sub kegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD sebesar Rp. 300.300.000,- (tiga ratus juta tiga ratus ribu

rupiah) menjadi Rp. 295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 119.211.883,- (seratus sembilan belas juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang diperoleh dari pergeseran anggaran sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor untuk memenuhi kebutuhan Belanja Modal pengadaan laptop, kamera dan *smart* TV ruang rapat kantor sehingga anggarannya yang semula Rp. 70.754.617,- (tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh belas rupiah) menjadi Rp. 189.966.500,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatannya antara lain:

1.7.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 19.006.976,- (sembilan belas juta enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang digeser ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sehingga yang semula anggarannya sebesar Rp. 335.539.476,- (tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) diharapkan menjadi Rp. 316.532.500,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada APBD-p;

1.7.2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 968.960,- (sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk memenuhi kebutuhan penambahan JKK JKM Non ASN

yang diperoleh dari pergeseran anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sehingga anggarannya yang semula Rp. 29.231.040,- (dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah) diharapkan akan menjadi Rp. 30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah);

- 1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 35.612.880,- (tiga puluh lima juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang digeser ke Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan sebesar Rp. 31.507.120,- (tiga puluh satu juta lima ratus tujuh ribu seratus dua puluh rupiah) yang digeser ke sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sehingga anggarannya yang semula Rp. 310.730.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) diharapkan menjadi Rp. 243.610.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

- 2.1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan sub kegiatannya antara lain:

- 2.1.1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro perlu dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 20.742.363,- (dua puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) yang digeser ke Program Hubungan Industrial kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja,

sehingga anggaran yang semula Rp. 154.541.061,- (seratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu enam puluh satu rupiah) diharapkan menjadi Rp. 133.798.698,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);

2.1.2. Fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 40.841.049,- (empat puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) yang digeser ke Program Hubungan Industrial kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota sub kegiatan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja, sehingga anggaran yang semula Rp. 124.541.070,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) diharapkan menjadi Rp. 83.700.021,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu dua puluh satu rupiah);

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga;

3.1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan sub kegiatannya:

3.1.1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dilakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga anggarannya yang semula Rp. 1.124.011.306,- (satu milyar seratus dua puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus enam rupiah) diharapkan akan menjadi Rp. 1.034.011.306,- (satu milyar tiga puluh empat juta sebelas ribu tiga ratus enam rupiah);

3.1.2. Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota dilakukan pengurangan atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp.

133.486.668,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga anggarannya yang semula Rp. 142.118.185,- (seratus empat puluh dua juta seratus delapan belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) dikarenakan telah dilakukan pencairan sebesar Rp. 8.631.517,- (delapan juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah) sebelum proses APBD-p dilakukan;

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

4.1. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran dilakukan pengurangan atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 46.250.460,- (empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) sehingga anggarannya menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) pada APBD-p Tahun Anggaran 2024;

5. Program Hubungan Industrial

5.1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan antara lain:

5.1.1. Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan mengurangi atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 42.953.388,- (empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga anggaran yang semula Rp. 139.667.574,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadi Rp. 96.714.186,- (sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah);

5.1.2. Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja dilakukan penyesuaian anggaran sebesar Rp. 2.217.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh belas juta rupiah) hasil dari pergeseran anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Admidnistrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN guna memenuhi alokasi anggaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan (DBH Sawit) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang, penyesuaian anggaran sebesar Rp. 61.562.546,- (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) hasil dari pergeseran anggaran Program Perencanaan Tenaga Kerja Kegiatan Rencana Tenaga Kerja dan usulan penambahan anggaran sebesar Rp. 806.400.000,- (delapan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) untuk memenuhi anggaran JKK JKM Pekerja Rentan sebanyak 24.000 (dua puluh empat) ribu orang selama 2 (dua) bulan. Sehingga anggaran sub kegiatan yang semula sebesar Rp. 6.365.074.458,- (enam milyar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) diharapkan menjadi Rp. 7.233.037.004,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu empat rupiah);

6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

6.1. Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota sub kegiatan pelatihan transmigrasi dilakukan pengurangan atau rasionalisasi anggaran sebesar Rp. 103.550.181,- (seratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga anggaran yang semula sebesar Rp. 133.725.573,- (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp. 0,- (nol rupiah) dikarenakan telah dilakukan

pencairan sebesar Rp. 30.175.392,- (tiga puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) sebelum proses APBD-p berjalan.

Lebih jelas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting		
	1	2	3	4						5	6						7	8
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik.							Indeks Reformasi Birokrasi			63	63							
1.1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah							Predikat Akuntabilitas			BB	BB							
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					24.564.584.479,00	22.397.226.908,00	-	2.167.357.571,00	-8,82		
	2	7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					24.564.584.479,00	22.397.226.908,00	-	2.167.357.571,00	-8,82		
	2	07	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	2 dokumen	2 dokumen	176.193.838,00	194.202.718,00	18.008.880,00	10,22	penyesuaian anggaran dari pergeseran anggaran servis kendaraan
	2	07	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	2 dokumen	2 dokumen	226.846.848,00	262.459.728,00	35.612.880,00	15,70	
						01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	2 dokumen	2 dokumen	176.193.838,00	194.202.718,00	18.008.880,00	10,22	penyesuaian anggaran dari pergeseran anggaran servis kendaraan
						06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	4 laporan	4 laporan	50.653.010,00	68.257.010,00	17.604.000,00	34,75	penyesuaian anggaran dari pergeseran anggaran servis kendaraan
	2	07	01	2	02		Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase admistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	2 dokumen	2 dokumen	12.541.262.709,00	7.766.883.830,00	-	4.774.378.879,00	-38,07

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	8	9	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan													
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terseainya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	50 orang	49 orang	12.541.262.709,00	7.766.883.830,00	- 4.774.378.879,00	-38,07	Digeser Rp.2.217.000.000 ke BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan sektor perkebunan dan dikurangi/dirasio sebesar Rp.2.557.378.879
	2	07	01	2	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%	100%	691.200.000,00	672.000.000,00	- 19.200.000,00	-2,78	
					02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	691.200.000,00	672.000.000,00	- 19.200.000,00	-2,78	pengurangan honor tenaga keamanan 1 org; anggarannya digeser ke sppd rutin
	2	07	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	100%	43.930.000,00	-	- 43.930.000,00	-100,00	
					11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	5 orang	0 orang	43.930.000,00	-	- 43.930.000,00	-100,00	sub kegiatan dirasionalisasi
	2	07	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	100%	1.712.471.328,00	1.602.267.271,00	- 110.204.057,00	-6,44	
					01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terseainya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	2 paket	2 paket	30.763.471,00	30.763.471,00	-	0,00	
					02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terseainya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	2 paket	2 paket	95.989.976,00	95.989.976,00	-	0,00	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	1	2	3	4						8	9					
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	2 paket	1 paket	302.520.000,00	163.500.000,00	- 139.020.000,00	-45,95	rasionalisasi pada akun belanja makan minumscurity, anggaran digeser ke sub kegiatan pengadaan sarana prasarana dan sspd rutin
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	2 paket	2 paket	121.666.663,00	101.353.303,00	- 20.313.360,00	-16,70	anggaran akun belanja spanduk/balho digeser ke sspd rutin
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	1 dokumen	1 dokumen	17.024.600,00	13.050.000,00	- 3.974.600,00	-23,35	rasionalisasi pada akun belanja cetak buku peraturan perundang-undangan dirasio
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	400 laporan	500 laporan	844.206.618,00	902.410.521,00	58.203.903,00	6,89	rasionalisasi pada akun belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 39.530.557, pergeseran akun belanja makan minum rapat ke akun belanja perjalanan dinas sebesar Rp.24.000.000 dan penambahan anggaran dari sub kegiatan lain pada program yang sama sebesar Rp. 58.203.903
				11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	1 dokumen	1 dokumen	300.300.000,00	295.200.000,00	- 5.100.000,00	-1,70	akun belanja pemeliharaan website = 7.500.000 digeser ke penambahan gaji anak honor : 2 org*400.000*3 bln = Rp.2.400.000 (sub kegiatan yang sama) dan sspd rutin Rp. 5.100.000

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	2	07	01	2						07	8						9
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	2	07	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	155.084.617,00	274.296.500,00	119.211.883,00	76,87	
					05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	65 unit	65 unit	84.330.000,00	84.330.000,00	-	0,00	
					10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	30 unit	34 unit	70.754.617,00	189.966.500,00	119.211.883,00	168,49	pergeseran dari akun belanja makan minumscurity utk pengadaan laptop : 2 unit*18.132.000 Rp.36.264.000; pengadaan tv smart: 1 unit Rp.60.371.473 dan pengadaan kamera 1 unit Rp.22.576.410
	2	07	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan			100%	100%	602.670.166,00	584.632.150,00	- 18.038.016,00	-2,99	
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	800 laporan	800 laporan	237.899.650,00	237.899.650,00	-	0,00	
					02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	12 laporan	12 laporan	335.539.476,00	316.532.500,00	- 19.006.976,00	-5,66	anggaran akun belanja sumber daya listrik digeser ke sppd rutin
					04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	1 laporan	1 laporan	29.231.040,00	30.200.000,00	968.960,00	3,31	penambahan JKK JKM Non ASN dri sppd rutin
	2	07	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	1.326.747.874,00	1.259.627.874,00	- 67.120.000,00	-5,06	
					02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	13 unit	13 unit	310.730.000,00	243.610.000,00	- 67.120.000,00	-21,60	akun belanja servis mobil digeser ke program Rp. 35.612.880 dan ke sppd rutin Rp. 31.507.120

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	1	2	3	4						8	9						10
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	40 unit	40 unit	48.820.000,00	48.820.000,00	-	0,00		
				09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	6 unit	6 unit	648.647.874,00	648.647.874,00	-	0,00		
				10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	11 unit	11 unit	318.550.000,00	318.550.000,00	-	0,00		
Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah							Tingkat Pengangguran Terbuka			8,54%	8,54%						
2.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja							Tingkat Kesempatan Kerja			96%	96%						
	2	07	02		Program Perencanaan Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Persentase Ketersediaan Data Perusahaan, Lembaga Pelatihan dan Ketenagakerjaan			90%	90%	279.082.131,00	217.498.719,00	-	61.583.412,00	-22,07	
	2	07	02	2	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja		35%	35%	279.082.131,00	217.498.719,00	-	61.583.412,00	-22,07	
				01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	1 dokumen	1 dokumen	154.541.061,00	133.798.698,00	-	20.742.363,00	-13,42	anggaran digeser ke sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
				02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	10 orang	10 orang	124.541.070,00	83.700.021,00	-	40.841.049,00	-32,79	anggaran digeser ke sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jamsostek dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting
	1	2	3	4	5						6	7					
	2	07	03					Tingkat Kompetensi Daya Saing Produktivitas Tenaga Kerja			100%	100%					
	2	07	03					Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kerja Dengan Sertifikasi Kompetensi			25%	25%	1.576.952.462,00	1.353.465.794,00	- 223.486.668,00	-14,17	
	2	07	03	2	01			Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi			100%	100%	1.372.677.153,00	1.149.190.485,00	- 223.486.668,00	-16,28	
						01		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	95 orang	85 orang	1.124.011.306,00	1.034.011.306,00	- 90.000.000,00	-8,01	
						02		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	4 lembaga	4 lembaga	106.547.662,00	106.547.662,00	-	0,00	
						03		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	25 unit	0 unit	142.118.185,00	8.631.517,00	- 133.486.668,00	-93,93	sub kegiatan dirasionalisasi
	2	07	03	2	02			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Sw asta Yang Terbina Sw asta Yang Dibina			10 Lembaga	10 Lembaga	105.885.036,00	105.885.036,00	-	0	
						01		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Sw asta yang Dibina	Kabupaten Bengkulu	DAU-DBH	10 lembaga	10 lembaga	105.885.036,00	105.885.036,00	-	0,00	
	2	07	03	2	04			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			5 perusahaan	5 perusahaan	98.390.273,00	98.390.273,00	-	0	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	1	2	3	4						8	9						
				01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultansi kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	5 perusahaan	5 perusahaan	98.390.273,00	98.390.273,00	-	0,00		
2.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja							Tingkat Kesempatan Kerja			96%	96%						
	2	07	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan			85%	85%	283.123.635,00	236.873.175,00	- 46.250.460,00	-16,34		
	2	07	04	2	03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100%	100%	236.873.175,00	236.873.175,00	-	0		
					02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	5000 orang	2000 orang	98.712.306,00	98.712.306,00	-	0,00	
					03	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya a Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	100 orang	100 orang	138.160.869,00	138.160.869,00	-	0,00	
	2	07	04	2	04	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya a Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Jumlah PMI Yang Dilindungi		25 Orang	0 Orang	46.250.460,00	-	- 46.250.460,00	-100		
					02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kabupaten Bengkalis	DA U-DBH	25 orang	0 orang	46.250.460,00	-	- 46.250.460,00	-100,00	sub kegiatan dirasionalisasi
2.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja							Besaran Kasus Hubungan Industrial Yang terselesaikan			27%	27%						
	2	07	05		Program Hubungan Industrial	Menu runnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial			95%	95%	5.125.212.709,00	8.167.221.867,00	3.042.009.158,00	59,35		

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	1	2	3	4						8	9						
	2	07	05	2	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) bagi perusahaan di Kabupaten Bengkalis; 2. Terlaksananya Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi perusahaan	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	419.861.753,00	419.861.753,00	-	0	
					01	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di W/LKP	Jumlah Perusahaan yang melakukan Pengesahan peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di W/LKP Online	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	20 perusahaan	20 perusahaan	78.959.286,00	78.959.286,00	-	0,00	
					02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	5 perusahaan	5 perusahaan	62.719.260,00	62.719.260,00	-	0,00	
					03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	1 laporan	1 laporan	278.183.207,00	278.183.207,00	-	0,00	
	2	07	05	2	02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			100%	100%	4.705.350.956,00	7.747.360.114,00	3.042.009.158,00	64,65	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	1	2	3	4						8	9						
				01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	25 perkara	25 perkara	139.667.574,00	96.714.186,00	-	42.953.388,00	-30,75	rasionalisasi/pengurangan anggaran
				02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	25 perkara	25 perkara	139.667.297,00	139.667.297,00	-	0,00		
				03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	20 asosiasi	20 asosiasi	80.703.294,00	80.703.294,00	-	0,00		
				04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	1 lembaga	1 lembaga	197.238.333,00	197.238.333,00	-	0,00		
				05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Bengkalis	DAU-DBH	24000 orang	34000 orang	4.148.074.458,00	7.233.037.004,00	3.084.962.546,00	74,37	penambahan JKK JKM Non ASN (pekerja rentan): 2 bln*24.000 org * 16.800 = Rp.806.400.000 penambahan/pekerjaan dari akun gaji tpp utk BPJS DBH Sawit utk 10.000 org : Rp.2.217.000.000 penambahan sppd + atk: Rp.61.562.546 dari akun sub ken RTK	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode				Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap APBD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
	1	2	3	4						8	9						
2.1. Meningkatnya Kesempatan Kerja							Tingkat Kemandirian Transmigran			100%	100%						
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							235.226.156,00	131.675.975,00	-	103.550.181,00	-44,02	
	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							235.226.156,00	131.675.975,00	-	103.550.181,00	-44,02	
	3	32	02			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi *** Program Unggulan	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi				101.500.583,00	101.500.583,00	-	0		
	3	32	02	2	01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				101.500.583,00	101.500.583,00	-	0		
					04	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert, Kab. Bengkalis	DAU-DBH	1 dokumen	1 dokumen	101.500.583,00	101.500.583,00	-	0,00	
	3	32	03			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi				133.725.573,00	30.175.392,00	-	103.550.181,00	-77,43	
	3	32	03	2	01	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penataan persebaran penduduk dari 1 (satu) daerah Kabupaten /Kota				133.725.573,00	30.175.392,00	-	103.550.181,00	-77,43	

Tujuan / Sasaran Strategis	Kode					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) /	Lokasi	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Awal Sebelum Perubahan/ DPA (Rp)	Pagu Awal Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Terhadap ABPD 2024)	Rasio (%)	Catatan Penting	
											Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					06	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupal, Kab. Bengkalis	DAU-DBH	20 orang	-	133.725.573,00	30.175.392,00	-	103.550.181,00	-77,43	sub kegiatan dirasionalisasi
													24.799.810.635,00	22.528.902.883,00	-	2.270.907.752,00	-9,16	



Bengkalis, 16 Agustus 2024
 Kepala Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis,

(Handwritten signature in blue ink)
SALMAN ALFARISI, S.T.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19820519 201102 1 001

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk perubahan anggaran tahun 2024, sebagai dokumen acuan bagi pelaksanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang berisikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target, serta pagu indikatif dalam satu tahun anggaran berjalan.

Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan diupayakan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Monitoring dan evaluasi yang bersifat internal organisasi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahun berikutnya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2024 disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait. Anggaran yang semula Rp. 24.799.810.635,- (dua puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

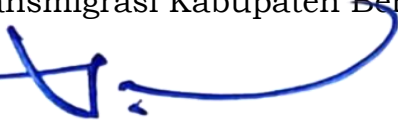
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 diusulkan penyesuaiannya sebesar Rp. -2.270.907.752,00 (minus dua milyar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) sehingga diharapkan menjadi Rp. 22.528.902.883,- (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.

Dengan adanya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis ini diharapkan penerapan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada di Kabupten Bengkalis.

Demikianlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2024 ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua program dan kegiatan di tahun 2024. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, karenanya diharapkan dari semua unsur yang terlibat dapat memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen ini.



Bengkalis, 16 Agustus 2024
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis,


SALMAN ALFARISI, S.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19820519 201102 1 001